

ANALISA *FRAMING* PEMBERITAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DI MEDIA ONLINE

Oktafiani Herlina

Program Studi Penyiaran, Akademi Komunikasi Radya Binatama

Jl. Raya Janti No.3/47 Karangjambe Yogyakarta

oktafiani.herlina@akrb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemberitaan kebijakan pemerintah terhadap penanganan virus corona di media online pada 2020. Media memberikan informasi terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam menangani virus ini. Penelitian kualitatif *text based* ini dilakukan dengan analisis *framing*. Skema *framing* Robert Entmant digunakan untuk menggambarkan realitas pemberitaan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di media online. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Proses penelitian dilakukan dengan menginterpretasikan pendefinisian masalah, perkiraan permasalahan, pembuatan keputusan moral, dan penekanan kepada penyelesaian. Hasilnya, *framing* pemberitaan penanganan Covid-19 dibangun sejalan dengan kebijakan yang disampaikan pemerintah di media massa. Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dapat menentukan arah narasi pemberitaan di media. Kebijakan yang diambil pemerintah selalu memiliki narasi politik, ekonomi, dan kesehatan. Ketiga hal tersebut menjadi narasi yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberitaan. Media sering mengkritisi kebijakan pemerintah yang sering tidak tepat dan tidak terkoordinasi sehingga lama-lama masyarakat jenuh dengan informasi-informasi itu. Media seharusnya dapat memberikan harapan kepada masyarakat supaya optimis dan bersemangat dalam menghadapi situasi pandemi.

Kata Kunci: Covid-19, Virus corona, Media, *Framing*

ABSTRACT

The coronavirus has caused social, economic, and psychological effects all over the world. This virus is easy to spread and can pose a risk of death. Indonesia is one of the countries most affected by this virus. At the beginning of its appearance, the information about those overflowed in the mass media. The media inform about Covid-19 and government policies in handling these virus. This text-based qualitative research was conducted by framing analysis. Robert Entmant's framing scheme is used to describe the reality of reporting on government policies related to handling of Covid-19 in online media. The data collection techniques is through observation, documentation, and literature study. The research process is carried out by interpreting the stage of defining the problem, estimating problems, making moral decisions and emphasizing the solution. As a result, the news framing of the handling of Covid-19 was built in line with the policies conveyed by the government in the mass media. Public communication carried out by the government can determine the direction of the news narrative in the media. The policies taken by the government always have a political, economic, and health narrative. These three things become a narrative that can not be separated in the news. The media often criticize government policies which are often inappropriate and uncoordinated so they are fed up with those informations sooner. The media should be able to give hope to the public to be optimistic and enthusiastic in dealing with the pandemic situation.

Keywords: Covid-19, Coronavirus, Media, *Framing*

PENDAHULUAN

Penyakit *corona virus* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *corona virus*. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua dan yang memiliki masalah kesehatan seperti kardiovaskuler, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker sangat rentan jika terinfeksi virus ini karena penyakitnya akan menjadi lebih serius. Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau tetesan cairan dari hidung saat batuk atau bersin. Hingga saat ini, belum ada obat untuk Covid-19. Berbagai uji klinis dilakukan untuk mengevaluasi perawatan yang harus dilakukan untuk penyakit ini (WHO, 2020)

Penyakit ini muncul pertama kali di Cina pada 31 Desember 2019. Kasus *pneumonia* yang terdeteksi di Wuhan itu pertama kali dilaporkan ke *World Health Organization* (WHO). Segera setelahnya, pada 1 Januari 2020, otoritas kesehatan Cina menutup pasar Huanan setelah ditemukan bahwa hewan liar yang dijual di pasar Wuhan merupakan pembawa virus tersebut. Pada 7 Januari 2020, pihak berwenang Cina mengonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru, yang awalnya oleh WHO disebut sebagai *2019-nCoV*. Pada 11 Januari 2020, Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat *corona virus*. Selanjutnya, pada 13 Januari 2020, pemerintah Thailand melaporkan kasus infeksi yang disebabkan virus corona. Setelahnya, banyak penduduk di dunia yang sudah terjangkit virus tersebut dan telah menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa. Di Indonesia, meski awalnya pemerintah Indonesia sempat beberapa kali menyangkal jika virus tersebut bisa sampai ke Indonesia, tetapi akhirnya pemerintah mengumumkan jika warganya sudah ada yang terinfeksi virus Corona (Bramasta, 2020)

Dua pekan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua pasien terkonfirmasi positif corona, pemerintah masih belum mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis. Berawal dari peristiwa tersebut, luapan informasi tentang Covid-19 tanpa henti mewarnai media massa seiring dengan melonjaknya angka kasus yang muncul. Akibat informasi yang berlebihan, masyarakat kemudian merasa panik, cemas, dan setres (Yuniarto, 2020). Dalam pemberitaan Covid-19 di Indonesia, banyak pihak secara sinis menuding bahwa media massa hanya menciptakan kepanikan bagi publik. Media massa dianggap menyebarkan informasi yang simpang siur, miskin data, dan hanya fokus mencari sensasi agar dibaca oleh publik. Para jurnalis dianggap kurang disiplin dalam verifikasi data dan konfirmasi narasumber karena hanya mengejar kecepatan dalam publikasi berita (Fahrimal et al., 2020, p. 171). Media juga kerap menjadi referensi yang digunakan untuk membentuk realitas yang mudah untuk diterima di masa-masa sulit seperti ini (Fisipol, 2020).

Media dalam pemberitaannya menggiring persepsi masyarakat melalui berita yang ditampilkan. Bahasa-bahasa bermakna tertentu yang dipakai mampu mengarahkan bagaimana pemikiran atau gaya berpikir masyarakat dalam menyikapi persoalan tertentu. Hal inilah yang menggambarkan keberpihakan media terhadap pihak maupun kepentingan tertentu yang ada di balik pemberitaannya. Unsur-unsur bentuk (komunikasi ini) meliputi berbagai media dan format yang digunakan oleh media tersebut. Format terdiri dari sebagian dalam bagaimana materi diatur, gaya penyajiannya, fokus atau penekanan dan tata bahasa komunikasi media (McQuail, 1994, p. 109).

Oleh karena itu, peneliti berharap dapat membongkar narasi yang ada di media dan mengungkap bingkai media dalam memberitakan kebijakan pemerintah terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan

dalam penelitian ini adalah; bagaimana analisa *framing* pemberitaan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di media online?

TINJAUAN LITERATUR

a. *Framing* Media

McCombs mendefinisikan *framing* adalah pemilihan sejumlah terbatas atribusi tematis untuk dimasukkan dalam agenda media ketika objek tertentu dibahas (Griffin EM, 2006, p. 405). Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedakan cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Bingkai (*frame*) yang dikonstruksi media akan sangat menentukan bagaimana publik bersikap dan respon apa yang akan ditampilkan. Diskursus Covid-19 yang dibangun oleh media berpengaruh terhadap makna, eskalasi, dampak, respon, dan strategi menghadapi krisis akibat bencana (Van der Meer dalam Fahrimal et al., 2020, p. 171).

Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut. Karenanya berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakkan (Sobur, 2009, p. 162).

Ada beberapa model pendekatan analisis *framing* yang dapat digunakan untuk menganalisis teks media, salah satunya adalah model analisis Robert N. Entman yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Robert N Entmant apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan menafsirkan realitas tersebut.

Entmant melihat *framing* dalam dua dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. *Framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita.

Tabel 1. Dua Unsur *Framing* Media versi Entmant

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek tertentu dari suatu isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk

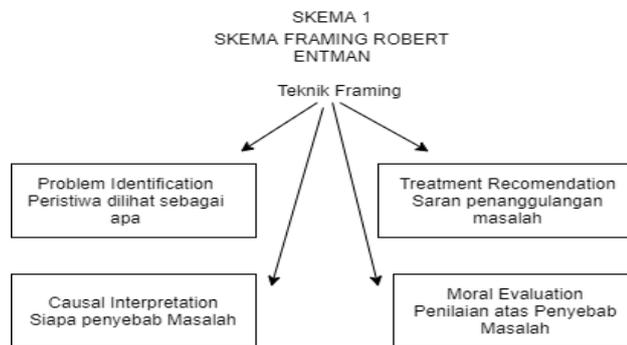
	ditampilkan kepada khalayak.
--	------------------------------

Sumber: (Eriyanto, 2011, p. 222)

Framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu tertentu dan menggunakan berbagai strategi wacana serta penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline*, di halaman depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan. Kata penonjolan (*salience*) didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan (Sobur, 2009, p. 164).

Entman menggambarkan perangkat *framing* yang digunakan dalam pbingkai media yang menampilkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Entman membagi perangkat *framing* ke dalam empat elemen dalam skema berikut:

Gambar 2. Skema *Framing* Robert Entmant



Sumber: (Sobur, 2009, p. 174)

Framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa, kedua, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah, ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah, dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu acara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya (Sobur, 2009, p. 142).

Wartawan dalam memberitakan melakukan seleksi isu terlebih dahulu baru kemudian menekankan atau menonjolkan aspek-aspek realitas. Hal tersebut akan lebih mengedepankan perspektif wartawan untuk menentukan fakta yang dipilih, ditonjolkan, dan dibuang. Di balik semuanya, pengambilan keputusan mengenai sisi yang ditonjolkan selalu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Penonjolan bisa jadi merupakan bagian dari pemilihan *angle* berita yang membuat proses pembuatan informasi menjadi lebih bermakna.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status dan kepentingan umum), baik secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin dalam

kehidupan. Kebijakan publik menyiratkan adanya pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan baik melalui pengaturan atau jika diperlukan dengan memaksa. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara jika pemerintah yang melakukan diarahkan pada pemerintah negara. Kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik (Ali, Faried & Alam, 2012)

Kebijakan pemerintah dituangkan dalam bentuk undang-undang, Keputusan Presiden (kepres), Kepmen (Keputusan Menteri), Perpu dan sebagainya yang sifatnya memaksa seluruh warga masyarakat untuk mengikuti aturan tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan dari regulasi tersebut dari masyarakat dapat dikenakan sanksi baik secara pidana maupun perdata.

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *text-based* dengan skema *framing* Robert Entmant untuk menggambarkan realitas pemberitaan media online dalam memberitakan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Dalam penelitian ini, beberapa cara dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung diantaranya: melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana media massa membingkai kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Peneliti dapat mengetahui bingkai media massa dalam pemberitaan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Media massa yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah media online.

c. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen

Dalam penelitian ini, beberapa cara dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung, diantaranya: melalui observasi, dokumen, dan studi pustaka. Peneliti menganalisis berita-berita di beberapa media online seperti Monitor.id, CNN Indonesia, cnbcIndonesia.com, tempo.co, wartaekonomi.co.id, republika.co.id, kompas.com, mediaindonesia.com, detik.com, tirto.id, dan antara.co.id. Penulis memilih berita di media tersebut karena mewakili kronologi kebijakan pemerintah yang diambil di awal pandemi. Untuk itu, penulis melihat dari beberapa media online supaya dapat membuktikan *framing* pemberitaan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di media online. Selanjutnya, penulis mengumpulkan berita-berita berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan mendokumentasikannya. Penulis melengkapi data yang peroleh dari literatur yang dibaca di buku dan jurnal.

d. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif *text based* untuk menganalisis *framing* media. Analisis *framing* dinilai mampu menggambarkan realitas berita isu-isu kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 di media online. Analisa Robert N. Entman digunakan untuk mendefinisikan narasi-narasi di media online. Peneliti menggunakan pisau analisa ini untuk mencari tahu makna dibalik pembingkai berita tersebut. Analisa *Framing* dinilai dapat

menempatkan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi penempatan yang lebih besar.

Tabel 2. Perangkat *Framing Entmant*

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: (Eriyanto, 2011, p. 223)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Analisa *Framing* Robert N. Entmant dalam Pemberitaan di Media Online

No	Berita	Konten Pemberitaan	<i>Framing</i>
1.	 <p>(Syaefudin, 2020: Monitor.co.d)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Upaya Anis Baswedan untuk mengantisipasi masuknya virus corona di Indonesia memperoleh reaksi dari PDIP yang merespon jika apa yang dilakukan Anis berlebihan dan menakutkan.</p> <p>Diagnosis caused</p> <p>Anis meminta Kemenkes transparan soal orang yang positif Covid-19.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Politikus PDIP tidak menyetujui respon Anis dan</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Anis Baswedan sudah mengawasi orang sejak awal Januari dan menjadi satu satunya pejabat yang memberikan perhatian besar terhadap virus tersebut</p> <p>Interpretasi</p> <p>Jumlah positif corona di Indonesia naik 2 kali lipat dari 34 kasus menjadi 69 kasus. Anis ingin Kemenkes menjelaskan kepada publik secara transparan akibat kurangnya informasi terkait virus.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Berita mengutip <i>statement</i> lawan politik Anis yang mengkritiknya karena telah</p>

		<p>alasanya.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Politisi PDIP mengkritik sikap Anis yang memberikan pernyataan ke media supaya Kemenkes bersikap transparan.</p>	<p>membuat masyarakat takut.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Politisi PDIP meminta Anis berkoordinasi dengan pusat dan tidak terlalu reaktif dengan penanganan Covid-19 karena Kemenkes tentu punya pertimbangan sendiri. Politisi tersebut meminta Pemerintah Provinsi DKI memberikan edukasi dan sosialisasi supaya masyarakat tidak panik.</p>
<p>2.</p>	 <p>(CNN Indonesia, 2020c)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Menkes Terawan membantah hasil riset dari peneliti Harvard T.H Chan <i>School of Public Health</i> yang memprediksi virus corona sudah masuk ke Indonesia.</p> <p>Diagnosis caused</p> <p>Peneliti Harvard menyebut jika virus corona tak terdeteksi ketika masuk ke Indonesia karena sistem kesehatan yang dimiliki Indonesia tidak dapat mendeteksi virus tersebut.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Pernyataan didasari intensitas frekuensi penerbangan dari dan ke Wuhan yang menjadi lokasi asal wabah virus corona.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Kasus yang tidak terdeteksi di</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Menkes menolak penelitian Harvard T.H Chan <i>School of Public Health</i> karena memiliki alat pendeteksi virus <i>pan-corona</i>, <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> dan mesin <i>Next Generation Sequencing (NGS)</i> serta keyakinan jika virus corona tidak bisa hidup di daerah tropis.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang belum memenuhi standar menjadi penyebab tidak terdeteksinya virus corona sehingga saat negara lain sudah mengumumkan kasus Covid-19, Indonesia masih nihil kasus.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Indonesia masih membuka pintu transportasi darat, laut, udara sehingga menjadi pintu masuk virus.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Peneliti khawatir jika kasus</p>

		<p>negara mana pun berpotensi menyebarkan epidemi.</p>	<p>corona tidak terdeteksi di Indonesia dapat menyebabkan epidemi.</p>
<p>3.</p>	 <p>(Adinda Putri, CNBC Indonesia 2020)</p>	<p>Define Problem</p> <p>PM Australia tidak mempercayai jika Indonesia <i>zero corona</i>.</p> <p>Diagnosed Caused</p> <p>PM Australia menyatakan sistem kesehatan dan kapasitas kesehatan di Australia dan Indonesia berbeda</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Pemerintah Indonesia melakukan segala hal sesuai prosedur WHO</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Pemerintah akan mengobservasi di Pulau Sebaru untuk mencegah penyebaran Covid-19,</p>	<p>Interpretasi</p> <p>PM Australia tidak percaya karena luas wilayah Indonesia menyulitkan pemerintah memantau seluruh penduduknya</p> <p>Interpretasi</p> <p>Perbedaan sistem kesehatan di Australia dan Indonesia memengaruhi deteksi kasus Covid-19.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Upaya pencegahan dan deteksi awal corona melalui prosedur WHO masih dipertanyakan akurasi.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Hasil observasi dan pemeriksaan untuk pendatang menggunakan alat PCR semuanya negatif</p>
<p>4.</p>	 <p>(Pebrianto, Tempo.co 2020)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Indonesia menunda anggaran untuk <i>influencer</i> dan media sebesar Rp.72 miliar untuk promosi pariwisata</p> <p>Diagnosed Caused</p> <p>Pemerintah memberi stimulus khusus bagi wisatawan asing. Anggaran dan stimulus akan diberikan, namun ditunda sampai semester dua.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Pemerintah memberikan</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Penundaan disebabkan karena Presiden mengumumkan pada 2 Maret terjadi kasus positif corona di Indonesia.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemerintah akan mengucurkan dana untuk media dan <i>influencer</i> sebesar Rp 72 miliar untuk promosi wisata dalam rapat terbatas antisipasi penyebaran covid terhadap perekonomian Indonesia pada 20 Februari 2020.</p>

		<p>anggaran pariwisata kepada <i>influencer</i> dan media sebesar Rp 72 miliar dan insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar, untuk subsidi diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, dan diskon tiket untuk menggenjot wisatawan dalam negeri dan insentif perpajakan.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Insentif diberikan kepada wisatawan yang diperkirakan tidak dari episentrum virus Corona</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Anggaran tersebut tidak dialihkan untuk penanganan virus corona dan bantuan bagi masyarakat terdampak sehingga dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Kebijakan tersebut beresiko terhadap daerah-daerah di luar episentrum virus corona karena akan orang keluar masuk kawasan.</p>
<p>5.</p>	 <p>(Rosmayanti, Wraetaekonomi.co.id. 2020)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Menkes Terawan membantah Gubernur DKI, Anis Baswedan mengenai kabar seratusan orang dalam pemantauan dan pengawasan terkait corona.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Anis memberikan data orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Gubernur DKI mengkritik Kemenkes yang tidak transparan dengan covid-19.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Menkes menjelaskan pemeriksaan specimen orang yang terduga terinfeksi menunjukkan hasil negatif, termasuk 188 WNI ABK</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Terawan membantah pernyataan Anis yang menyatakan sekitar 100an orang dipantau dan diawasi terkait corona karena hasil pemeriksaan PCR negatif</p> <p>Interpretasi</p> <p>Anis memberikan data orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan supaya waspada dengan penyebaran virus corona</p> <p>Interpretasi</p> <p>Gubernur DKI Anis Baswedan memberikan perhatian besar terhadap penyebaran virus corona. Anis menutup tempat wisata selama 2 minggu untuk mencegah penyebaran virus corona.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemerintah belum mengeluarkan aturan <i>sosial distancing/physical distancing</i> dan masih sibuk</p>

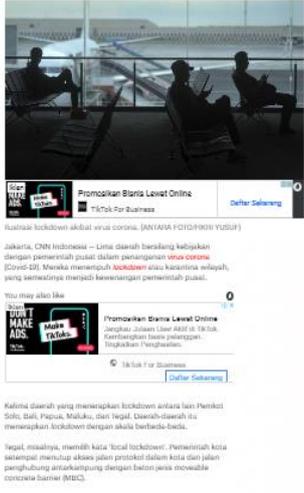
		<p><i>World Dream.</i></p>	<p>membantah kasus corona di Indonesia.</p>
<p>6.</p>	 <p>(Saubani, 2020 republika.co.id)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Menhub memberi pernyataan jika orang Indonesia kebal terhadap virus Corona karena makan nasi kucing.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Pernyataan Kemenhub menegaskan bahwa di Indonesia belum ada laporan kasus virus corona.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Kementerian Kesehatan RI baru saja menguji spesimen dari 60 kasus dalam beberapa minggu terakhir dan telah mengonfirmasi tidak ada satu pun kasus positif virus corona</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Virus ini membuat situasi ekonomi global menjadi tidak menentu</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Pernyataan Kemenhub menguatkan pernyataan Kemenkes jika di Indonesia belum ditemukan kasus positif corona.</p> <p>Interpretasi</p> <p><i>Medical Officer</i> dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) wilayah Indonesia, Vinod Kumar Bura mengatakan bahwa Indonesia mampu mendeteksi virus novel COVID-19 2019 sesuai standar WHO.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Kementrian Kesehatan sudah melakukan tes dan observasi pasien ODP dan PDP tetapi banyak pihak menyangsikan jika Indonesia negatif kasus corona.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Dampak virus yang besar menyebabkan banyak pihak mendesak pemerintah untuk melakukan upaya preventif supaya virus itu tidak menyebar ke Indonesia.</p>
<p>7.</p>		<p>Define Problem</p> <p>Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama corona di Indonesia</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Warga Jepang positif terpapar virus corona pada 27 Februari di Malaysia, setelah</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Presiden mengumumkan kasus pertama pada ibu dan anak berusia 64 dan 31 tahun yang tertular dari kawannya, warga Jepang yang baru saja ke Indonesia.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Hasil pemeriksaan masyarakat karena pemerintah Indonesia</p>

	<p>(Utomo, 2020 Kompas.com)</p>	<p>berkunjung ke Indonesia awal bulan lalu. Dua orang tersebut ikut diawasi oleh Pemprov DKI.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Media-media internasional memberitakan kasus corona pertama di Indonesia dan mengutip pernyataan Jokowi.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Otoritas Indonesia melakukan pengecekan siapa saja yang sudah melakukan kontak dengan pengunjung dari Jepang</p>	<p>membantah jika sudah ada kasus positif di Indonesia.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Informasi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya pemerintah membantah jika ada kasus corona di Indonesia sehingga pernyataan yang menyatakan jika Indonesia kebal corona tidak benar.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemerintah mempersiapkan penanganan virus dengan menyiapkan 100 rumah sakit dengan ruang isolasi sesuai standar internasional.</p>
<p>8.</p>	 <p>(Ramli, 2020 moneykompas.com)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Beberapa pemda ingin menutup penerbangan ke wilayahnya sebagai upaya pencegahan covid-19.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Penyebaran covid-19 di daerah disebabkan oleh mobilitas orang ke luar masuk daerah sehingga bandara harus ditutup.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Penutupan bandara merupakan wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sehingga bandara harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Imbauan itu berlawanan dengan kebijakan pemerintah untuk membuka akses antar kota untuk umum. Di negara-negara lain, pemerintahnya langsung menutup penerbangan ke negaranya untuk mencegah penyebaran virus.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Beberapa daerah di Indonesia terpapar covid-19. Padahal Indonesia terletak di negara kepulauan dengan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar kesehatan.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Penutupan bandara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan sehingga tidak mengganggu distribusi barang dan lalu</p>

		<p>Treatment Recommendation</p> <p>Pusat dapat membuka atau menutup penerbangan angkutan udara niaga maupun bukan niaga untuk mencegah penyebaran virus Covid 19.</p>	<p>lintas ekonomi.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Penutupan dilakukan setelah melakukan sosialisasi kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan pengguna jasa penerbangan. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemda dan seluruh <i>stakeholder</i> penerbangan dilakukan untuk meminimalisasi resiko.</p>
<p>9</p>	 <p>(Siagian, 2020 Mediaindonesia.com)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Jubir Kemenkes Ahmad Yurianto mengatakan keinginan masyarakat untuk mudik tidak masalah, meski pemerintah sedang mendorong masyarakat tidak mudik.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudik tetapi membuka jalur transportasi sehingga masyarakat dapat tetap mudik.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Pemerintah kesulitan berkoordinasi lintas sektor sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sering membingungkan masyarakat.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Juru bicara Kemenkes Achmad Yurianto mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Masyarakat boleh mudik asal menjaga jarak dan memberlakukan <i>physical distancing</i> supaya tidak menyebarkan virus.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Masyarakat tetap mudik ke kampung halaman karena akses transportasi tidak ditutup</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemerintah kesulitan untuk komunikasi ke publik karena kebijakannya sering tidak memihak masyarakat. Pejabat-pejabat publik malah memberikan <i>statement-statement</i> yang membingungkan</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemudik harus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tidak memegang bagian muka dan rajin mencuci tangan dengan sabun.</p>

<p>10</p>  <p>(Detik.com, 2020)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Gubernur DKI Jakarta membatasi mobilitas warga untuk mencegah penularan virus corona.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga penduduknya belum diperbolehkan melakukan aktivitas seperti sebelum dilakukan PSBB</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Anis meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah/ bepergian menjelang hari libur.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Pergub Nomor 47 Tahun 2020 hanya mengatur pergerakan orang keluar masuk Jakarta, bukan Jabodetabek seperti yang disampaikan Anies dalam konferensi pers.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>DKI Jakarta merupakan daerah episentrum corona sehingga mobilitas keluar kawasan Jabodetabek dapat meningkatkan resiko penularan virus corona di berbagai daerah.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Kebijakan itu untuk mencegah penyebaran virus corona karena Jakarta merupakan wilayah episentrum corona.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Menjelang perayaan Hari Raya Lebaran, masyarakat sering pulang kampung dan berkunjung ke sanak famili</p> <p>Interpretasi</p> <p>Setiap orang dilarang berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non alam penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>. Setiap orang melanggar akan diminta kembali ke daerahnya, jika dari luar Jakarta maka akan disarankan untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri</p>
--	---	--

<p>11</p> <p>(Thomas, Tirto.co.id) 2020</p>	 <p>Luhut Anulir SE Rekomendasi Pembatasan Transportasi Jabodetabek</p> <p>Rekomendasi pembatasan transportasi di Jabodetabek menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) dan mencegah timbulnya gelombang kedua.</p> <p>Menko Kemaritiman dan Kelautan Luhut Binsar Panjaitan membatalkan surat edaran nomor 5 tahun 2020 dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tentang pembatasan transportasi.</p> <p>Rekomendasi pembatasan di Jabodetabek melingkupi operasional sarana dan prasarana transportasi dan akses jalan tol dan berlaku sejak 1 April 2020 hingga masa tanggap darurat dicabut.</p> <p>Kebijakan pembatasan transportasi seharusnya dikeluarkan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 dan ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, bukan BPTJ.</p> <p>Pembatasan transportasi tergantung kebijakan Kemenkes. Gugus tugas dapat mengajukan ke Menkes. Menkes menentukan status karantina Kesehatan supaya sektor perhubungan mengendalikan lalu lintas.</p>	<p>Define Problem</p> <p>Menko Kemaritiman dan kelautan Luhut Binsar Panjaitan membatalkan surat edaran nomor 5 tahun 2020 dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tentang pembatasan transportasi</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Rekomendasi pembatasan di Jabodetabek melingkupi operasional sarana dan prasarana transportasi dan akses jalan tol dan berlaku sejak 1 April 2020 hingga masa tanggap darurat dicabut.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Kebijakan pembatasan transportasi seharusnya dikeluarkan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 dan ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, bukan BPTJ.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Pembatasan transportasi tergantung kebijakan Kemenkes. Gugus tugas dapat mengajukan ke Menkes. Menkes menentukan status karantina Kesehatan supaya sektor perhubungan mengendalikan lalu lintas.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Pembatalan pembatasan transportasi dibatalkan atas alasan ekonomi. Sebelumnya Luhut juga sudah menganulir penyetopan transportasi dari dan ke Jakarta.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pembatalan itu bertolak belakang dengan SK Kemenkes dan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pergerakan orang keluar masuk Jabodetabek.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Koordinasi yang kurang baik antar lembaga dan antara atasan dan bawahan menyebabkan komunikasi menjadi carut marut</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pembatasan transportasi dan PSBB dilakukan jika ada persetujuan dari Menkes. Menkes akan menyetujui jika syarat suatu wilayah untuk melakukan PSBB terpenuhi, jika tidak maka tidak diperbolehkan.</p>
---	---	--	---

<p>12</p>  <p>(CNN Indonesia, 2020b)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Beberapa daerah menetapkan <i>lockdown</i> atau karantina wilayah meski kewenangan ada di pemerintah pusat. Mereka adalah Pemkot Solo, Bali, Papua, Maluku, dan Tegal dengan skala berbeda.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa <i>lockdown</i>, skala nasional maupun daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diambil pemerintah daerah.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Pusat dan daerah lemah dalam koordinasi. Pemerintah pusat sulit mengambil kebijakan <i>lockdown</i> di suatu daerah karena pertimbangan ekonomi dan sosial.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Masyarakat dan kepala daerah tidak diberi gambaran utuh dan detail ihwal pemutusan rantai covid-19. Pemerintah tidak mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dibuat sehingga kebijakan pusat dan daerah menjadi tumpang tindih.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Lima daerah menetapkan isolasi mandiri karena pusat tidak memutuskan dengan cepat untuk melakukan isolasi mandiri.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemerintah menetapkan <i>lockdown</i> skala nasional dan daerah menjadi wewenang pusat. Namun, Pemerintah daerah terpaksa mengambil kebijakan itu karena jumlah kasus corona semakin banyak dan kebijakan dari pusat arahnya tidak jelas.</p> <p>Interpretasi</p> <p><i>Lockdown</i> bisa memicu protes sosial karena dapat memengaruhi perekonomian masyarakat. Pusat ketakutan mendapatkan protes dari masyarakat lokal. Pemerintah perlu bersikap tegas supaya pemerintah daerah tidak memutuskan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Masyarakat dan pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam penanganan covid-19 sehingga memahami kebijakan yang diambil pusat.</p>
---	--	--

<p>13</p>  <p>(Nurita, 2020)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengkritik sejumlah kepala daerah yang mengambil keputusan karantina wilayah atau <i>lockdown</i> untuk mencegah penyebaran virus Corona.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berhak menetapkan <i>lockdown</i>.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Banyak kasus positif covid-19 di daerah membuat beberapa kepala daerah membuat kebijakan sendiri untuk melakukan <i>lockdown</i> baik secara total maupun parsial.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Seluruh Kepala Daerah harus mengikuti instruksi Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan Mendagri, tidak boleh mengambil langkah-langkah sendiri untuk mencegah masuknya covid-19 ke wilayahnya.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Kritikan tersebut dialamatkan kepada Kepala Daerah yang menetapkan <i>lockdown</i> untuk mencegah penyebaran virus covid-19</p> <p>Interpretasi</p> <p>DPR mengimbau seluruh Kepala Daerah mengikuti instruksi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan Mendagri. Pemda tidak diperkenankan mengambil langkah-langkah sendiri yang dapat membuat masyarakat panik.</p> <p>Interpretasi</p> <p><i>Lockdown</i> di daerah dilakukan untuk membatasi keluar-masuk orang guna mencegah penyebaran kasus covid-19 karena semakin banyak kasus covid-19 di daerah.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Kepala Daerah cemas karena Pemerintah Pusat tidak membuat langkah-langkah cepat dan tidak memberikan kebijakan yang terarah terkait mobilitas penduduk menjelang Hari Raya.</p>
--	---	---

<p>14</p>  <p>(Antara, 2020)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Pemerintah melalui juru bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudik supaya mencegah penyebaran covid-19</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Faktor utama penyebaran covid-19 adalah pergerakan orang yang membawa virus.</p> <p>Make Moral Judgment</p> <p>Kesadaran masyarakat untuk membatasi pergerakan dengan tidak mudik sangat penting untuk menekan penyebaran virus.</p> <p>Treatment Recommendation</p> <p>Masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar untuk melindungi keselamatan.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Masyarakat diimbau tidak mudik ke kampung halaman masing-masing menjelang bulan Romadhon dan Lebaran. Masyarakat sering pulang kampung bertemu handai taulan.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Virus corona dapat menular karena dapat menempel di permukaan benda dan tahan berada di udara. Virus ini belum ditemukan obat dan vaksinya.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk tinggal di rumah sehingga dapat membatasi pergerakan dengan tidak mudik.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Jumlah kasus positif dan meninggal semakin banyak. Salah satu upaya untuk mencegah penularan virus ini dengan mengurangi mobilitas.</p>
<p>15</p>  <p>(CNN Indonesia, 2020a)</p>	<p>Define Problem</p> <p>Menteri PMK Muhajir Effendi menjelaskan jika pemerintah bersiap menjalankan <i>new normal</i> atau kenormalan baru di tengah pandemi virus corona sehingga mulai menyusun pelonggaran PSBB.</p> <p>Diagnosed Cased</p> <p>Presiden tengah mempersiapkan skenario pelonggaran PSBB dengan mengkaji berbagai pertimbangan.</p>	<p>Interpretasi</p> <p>Upaya pelonggaran PSBB dilakukan untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan memastikan penyebaran corona bisa dikendalikan.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Skenario pelonggaran PSBB akan diputuskan setelah <i>timing</i>-nya tepat dan melihat fakta, data-data di lapangan supaya terukur sehingga ekonomi dapat berjalan</p>

		<p><i>Make Moral Judgment</i></p> <p>Saat ini belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena muncul berbagai persepsi di masyarakat.</p> <p><i>Treatment Recommendation</i></p> <p>Dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan, pemerintah pusat adalah pihak yang menetapkan PSBB, sementara pihak yang melaksanakan PSBB adalah pemerintah daerah. PSBB terkait corona berlaku selama 2 pekan dan bisa diperpanjang oleh pemerintah daerah.</p>	<p>seperti biasa dan corona bisa dikendalikan.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Presiden Jokowi pertama kali memutuskan untuk menerapkan PSBB pada 31 Maret. Presiden memilih PSBB ketimbang karantina wilayah untuk membatasi mobilitas orang.</p> <p>Interpretasi</p> <p>Pemerintah melonggarkan PSBB untuk mempersiapkan <i>new normal</i> supaya ekonomi tetap berjalan, masyarakat bisa lebih produktif, dan virus corona dapat dikendalikan</p>
--	--	--	---

Sumber: (Eriyanto, 2011, p. 223)

Pemberitaan media bertumpu kepada beberapa narasi yang bergulir yang menjadi bingkai pemberitaan, yakni narasi politik, ekonomi, dan kesehatan. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana narasi tersebut muncul di pemberitaan media:

a. Narasi Politik

Anis Baswedan mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran virus dengan menutup tempat pariwisata dan tempat lain yang dapat menyebabkan kerumunan. Anis mengunjungi rumah sakit-rumah sakit, memantau kesiapan tenaga media dan fasilitas kesehatan dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Di media, apa yang dilakukan Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta dibawa ke arah politik bahwa itu untuk kepentingan Pemilu tahun 2024. Langkah Gubernur DKI Jakarta periode 2019-2023 ini dinarasikan hanya dijadikan alat untuk mencari panggung. Pengambilan kebijakan yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat sering dibelokkan media. Media memberikan *framing* jika Pemerintah Pusat mempersulit Anis dalam menangani penyebaran Covid-19. Pemberitaan-pemberitaan tersebut dapat memperkeruh suasana dan membuat penanganan Covid-19 menjadi kurang optimal.

Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Narasi tidak akurnya Walikota Surabaya, Tri Risma Harini dan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa mewarnai pemberitaan di media. Ketidakakuran dua pemimpin daerah tersebut diberitakan sebagai akibat dari persaingan mereka dalam Pilkada sebelumnya. Bahkan ada isu bahwa kecemburuan Gubernur Jawa Timur terhadap Tri Risma Harini terjadi karena Risma lebih dicintai masyarakat dan media.

b. Narasi Ekonomi

Sejak awal, pemerintah sering beralasan bahwa ekonomi dan investasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Di saat negara lain memutuskan untuk memberlakukan *lockdown*, pemerintah Indonesia justru tidak menutup kedatangan wisatawan asing dan tidak melakukan pembatasan keluar-masuk orang-orang ke berbagai daerah. Bahkan, untuk menarik wisatawan yang datang ke Indonesia, pemerintah memutuskan untuk mengurangi harga tiket pesawat dan mendatangkan blogger serta selebgram dari beberapa negara untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap masyarakat yang terimbas pandemi.

Setelah 3 bulan dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pada 15 Mei 2020, Jokowi mengumumkan akan menerapkan kebijakan *new normal* untuk memulihkan ekonomi. Berita-berita di media yang sebelumnya hanya memberitakan data korban dan penanganan Covid-19 di beberapa wilayah kemudian mulai memberitakan wacana pemerintah tentang *new normal*. Media kemudian menarasikan jika kehidupan harus terus dilanjutkan karena kondisi perekonomian sangat rentan jika kebijakan untuk tinggal di rumah dan pembatasan terus dilakukan. Dampak ekonomi menyebabkan perusahaan rugi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan banyak usaha gulung tikar karena kekurangan modal akibat daya beli masyarakat berkurang. Melambatnya usaha dan stagnannya ekonomi jika dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan permasalahan sosial.

c. Narasi Kesehatan

Pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau semi *lockdown* untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan hanya mengizinkan toko-toko yang menjual kebutuhan pokok untuk tetap berjualan. Namun, kebijakan tersebut dilakukan kurang cepat sehingga pada saat Idul Fitri 2020, penduduk di daerah episentrum penyebaran Covid-19 sudah berpindah ke daerah lain. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto saat itu memutuskan untuk melarang beroperasinya kendaraan termasuk ojol untuk membatasi mobilitas. Akan tetapi, PLT Menteri Perhubungan, Luhut Panjaitan justru memperbolehkan transportasi tetap berjalan dan ojol tetap bisa menarik penumpang. Media memberitakan perbedaan kebijakan ini sebagai suatu bentuk kurangnya koordinasi dan antara kementerian kesehatan dan perhubungan dalam menghadapi situasi pandemi.

KESIMPULAN

Virus corona telah menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologi yang sangat besar di seluruh dunia. Virus ini mudah menyebar dan dapat menimbulkan resiko kematian. Indonesia termasuk negara yang sangat terdampak dengan adanya virus ini. Di awal kemunculannya, informasi-informasi tersebut meluap di media massa. Berita terkait Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya memenuhi seluruh media baik cetak, elektronik, maupun online sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina.

Media memiliki peran menginformasikan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Dengan demikian, media perlu diteliti supaya masyarakat dapat mengetahui bagaimana arah pemberitaan media terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Penelitian ini menggunakan metode *framing* Robert N Entmant supaya dapat menggambarkan bagaimana *framing* media online dalam memberitakan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Penelitian dilakukan dengan menginterpretasikan pendefinisian masalah, perkiraan

permasalahan, pembuatan keputusan moral, dan penekanan kepada penyelesaian. Pemberitaan media online di awal pandemi lebih banyak menginformasikan kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Sebelum ditemukan kasus positif di Indonesia, media massa memberitakan tanggapan pemerintah terkait dugaan jika virus tersebut sudah ada di Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh Anis Baswedan untuk mengantisipasi penyebaran virus itu di Jakarta. Penolakan terhadap dugaan ditemukannya virus berhenti diberitakan media setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada kasus positif. Pemberitaan media selanjutnya menyoroti kebijakan tumpang tindih yang diambil oleh kementerian-kementerian. Kebijakan tidak diambil secara lintas sektor untuk menghadapi pandemi tetapi lebih mengedepankan ego sektoral.

Framing pemberitaan media dibangun sejalan dengan narasi yang disampaikan pejabat pemerintah. Komunikasi publik yang disampaikan tidak dapat lepas dari masalah politik, ekonomi, dan kesehatan. Masalah politik selalu dikaitkan dengan kontestasi yang akan dilakukan pada Pemilu 2024 nanti. Di samping itu, persaingan kontestasi di tahun sebelumnya selalu dikait-kaitkan dengan kinerja para pejabat sehingga tujuan utama untuk menangani penyebaran virus corona justru terdistorsi dengan narasi politik yang mewarnai pemberitaan media. Pernyataan-pernyataan para pejabat publik yang tidak dilakukan secara hati-hati dapat dibelokkan maksudnya sehingga berpotensi dapat memecah belah persatuan.

Masalah ekonomi dan kesehatan bagaikan 2 sisi mata uang yang saling berdampingan tidak bisa dipisahkan. Di awal pandemi, pemerintah lebih fokus terhadap pencapaian ekonomi dibandingkan kesehatan. Baru setelah kasus melonjak, pemerintah baru memperhatikan soal kesehatan sehingga kebijakan PSBB dan pembatasan transportasi baru dilakukan setelah virus menyebar ke daerah. Masalah kesehatan menjadi fokus pemerintah setelah jumlah korban positif dan jumlah mortalitas baik pasien maupun tenaga medis terus meningkat.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan virus corona, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai banyak kalangan tidak transparan, kurang terintegrasi antar sektoral serta antara pusat dan daerah sehingga kebijakan yang dikomunikasikan melalui media menjadi bias. Bias didasari karena sebagai pejabat pemerintah, para pejabat sering memberikan argumen-argumen yang bertolak belakang dan asal-asalan.

DAFTAR REFERENSI

- Adinda Putri, C. (2020). *Heboh PM Australia Ragukan RI yang Kebal Virus Corona, Why?*
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200301205817-4-141575/heboh-pm-australia-ragukan-ri-yang-kebal-virus-corona-why>
- Ali, Faried & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama.
- Antara. (2020). *Cegah penyebaran COVID-19, Pemerintahimbau warga tidak mudik*.
<https://www.antarane.ws.com/berita/1396186/cegah-penyebaran-covid-19-pemerintah-imbau-warga-tidak-mudik>
- Bramasta, D. (2020). *Update Virus Corona di Dunia 18 Juli 14.1 juta orang terinfeksi rekor Kasus Harian Covid-19 Global*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/18/074600065/update-virus-corona-di-dunia-18-juli--14-1-juta-orang-terinfeksi-rekor?page=all>

- CNN Indonesia. (2020a). *Bakal Longgarkan PSBB, Pemerintah Bersiap Terapkan New Normal*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518134942-20-504481/bakal-longgarkan-psbb-pemerintah-bersiap-terapkan-new-normal>
- CNN Indonesia. (2020b). *Lockdown Daerah, Simbol Karut-marut Penanganan Corona*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona>
- CNN Indonesia. (2020c). *Menkes Tantang Harvard Buktikan Virus Corona di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211195637-20-473740/menkes-tantang-harvard-buktikan-virus-corona-di-indonesia>
- Detik.com. (2020). *Anies: Pembatasan Berlaku di Jabodetabek, Warga Dilarang Tinggalkan Kawasan*. <https://news.detik.com/berita/d-5016382/anies-pembatasan-berlaku-di-jabodetabek-warga-dilarang-tinggalkan-kawasan>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. LKIS.
- Fahrimal, Y., Husna, A., Islami, F., & Johan. (2020). *Media dan Pandemi : Frame tentang Pandemi Covid-19 dalam Media Online di Indonesia* (Studi pada Portal Berita Kompas.com dan Detik.com). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24, 169–186. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/3100/1424>
- Fisipol. (2020). *Eksistensi, Produksi Informasi, dan Paradoksnya Peran Media di Masa Pandemi*. <https://fisipol.ugm.ac.id/eksistensi-produksi-informasi-dan-paradoksnya-peran-media-di-masa-pandemi/>
- Griffin EM. (2006). *A First Look at Communication Theory* (Sixth Edit). MC Graw Hill International Edition.
- McQuail, D. (1994). *Mass Communication Theory An Introduction* (Third Edit). Sage Publication Ltd.
- Nurita, D. (2020). *DPR Kritik Kepala Daerah Abaikan Instruksi Jokowi Soal Lockdown*. <https://nasional.tempo.co/read/1324659/dpr-kritik-kepala-daerah-abaikan-instruksi-jokowi-soal-lockdown>
- Pebrianto, F. (2020). *Indonesia Positif Corona, Anggaran Influencer 72 Miliar Ditunda*. <https://bisnis.tempo.co/read/1315882/indonesia-positif-corona-anggaran-influencer-72-miliar-ditunda>
- Ramli, R. R. (2020). *Banyak Pemda Ingin Tutup Bandara, Ini Respon Kemenhub*. <https://money.kompas.com/read/2020/03/26/053109326/banyak-pemda-ingin-tutup-bandara-ini-respon-kemenhub>
- Rosmayanti. (2020). *Terawan Bungkam Mulut Anies soal 115 Warga DKI dalam Pengawasan Corona*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read274636/terawan-bungkam-mulut-anies-soal-115-warga-dki-dalam-pengawasan-corona?page=1>
- Saubani, A. (2020). *Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing*. <https://republika.co.id/berita/q5ul4k409/kelakar-menhub-kita-kebal-corona-karena-doyan-nasi-kucing>
- Siagian, H. (2020). *Jubir Covid-19 tidak Persoalkan Mudik, Asalkan tidak Dekat-Dekat*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/299112/jubir-covid-19-tidak-persoalkan-mudik->

asalkan-tidak-dekat-dekat

Sobur, D. A. (2009). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Cetakan ke). PT Remaja Rosdakarya.

Syaefudin, A. (2020). *PDIP Minta Anies Tak Terlalu Reaktif Tangani Virus Corona*. Monitor.co.id. <https://monitor.co.id/2020/03/14/pdip-minta-anies-tak-terlalu-reaktif-tangani-virus-corona/>

Thomas, V. F. (2020). *Luhut Anulir SE Rekomendasi Pembatasan Transportasi Jabodetabek*. <https://tirto.id/luhut-anulir-se-rekomendasi-pembatasan-transportasi-jabodetabek-eKrx>

Utomo, A. P. (2020). *Indonesia Umumkan Kasus Pertama Virus Corona, Begini Pemberitaan Media Internasional*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/02/125038370/indonesia-umumkan-kasus-pertama-virus-corona-begini-pemberitaan-media?page=all>

WHO. (2020). *Corona Virus*. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Yuniarto, T. (2020). *Covid-19 dalam Bingkai Surat Kabar*. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/20/covid-19-dalam-bingkai-surat-kabar/>